



Distribusi Manfaat Pembangunan dalam Proyek Ibu Kota Nusantara (Ikn) dan Ketimpangan Sosial: Studi Kasus Di Kalimantan Timur

Hanum Iliyah Mufidah¹, Ajeng Novilya Dhanyswara², Adelia Septiana Putri³

S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Surabaya

hanumilmiyah.22023@mhs.unesa.ac.id¹, ajengnovillya.22025@mhs.unesa.ac.id²,

adelia.22028@mhs.unesa.ac.id³

Abstract (Bahasa Inggris)

The development of Indonesia's new capital city, Ibu Kota Nusantara (IKN), in East Kalimantan is a national strategic policy aimed at promoting regional development equity and economic growth beyond Java Island. However, large-scale development projects may also generate social inequality if the distribution of benefits is uneven. This article aims to analyze how the distribution of development benefits in the IKN project contributes to social inequality in East Kalimantan. The study employs a qualitative descriptive approach using a systematic literature review method, analyzing secondary data from academic journals, government reports, statistical data, and relevant publications issued between 2020 and 2025. The findings indicate that the IKN development has positively impacted regional economic growth through increased investment, job creation, and a reduction in poverty rates. Nevertheless, these economic benefits have not been evenly distributed. The increase in the Gini Ratio reflects growing income inequality, with middle- and upper-income groups benefiting more than local communities. This article concludes that the success of the IKN development should not be measured solely by economic and infrastructural achievements, but also by its capacity to ensure inclusive and socially just development. Therefore, affirmative policies and more participatory social mitigation mechanisms are required to achieve a fair distribution of development benefits for all segments of society.

Kata Kunci: (3-5 kata)

Ibu Kota Nusantara
Distribution of development benefits
Social inequality
Development politics
East Kalimantan

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan kebijakan strategis nasional yang diarahkan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Namun, pembangunan berskala besar juga berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial apabila distribusi manfaatnya tidak merata. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana distribusi manfaat pembangunan dalam proyek IKN berkontribusi terhadap ketimpangan sosial di Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur sistematis terhadap berbagai sumber sekunder, meliputi jurnal ilmiah, laporan pemerintah, data statistik, dan publikasi lembaga terkait yang terbit pada periode 2020–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan IKN memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan angka kemiskinan. Namun demikian, manfaat ekonomi tersebut belum terdistribusi secara merata. Peningkatan nilai Gini Ratio mengindikasikan adanya ketimpangan distribusi pendapatan, di mana kelompok masyarakat menengah dan atas memperoleh manfaat yang lebih

besar dibandingkan masyarakat lokal. Artikel ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan IKN tidak hanya ditentukan oleh capaian ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif dan mekanisme mitigasi sosial yang lebih partisipatif untuk memastikan distribusi manfaat pembangunan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Corresponding Author:

Hanum Iliyah Mufidah
S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas Negeri Surabaya
hanumilmiyah.22023@mhs.unesa.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan salah satu instrumen utama negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, pemerataan ekonomi, dan pengurangan ketimpangan antarwilayah. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai upaya transformasi sosial yang berkeadilan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan selalu memiliki dimensi politik yang kuat karena melibatkan keputusan strategis negara dalam mengalokasikan sumber daya, menentukan prioritas wilayah, serta mengatur relasi antara negara, pasar, dan masyarakat (Rosser, 2020).

Salah satu kebijakan pembangunan paling ambisius dalam sejarah Indonesia modern adalah pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah memandang proyek ini sebagai solusi atas berbagai persoalan struktural di Jakarta, seperti kepadatan penduduk, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta degradasi lingkungan. Selain itu, pembangunan IKN juga diposisikan sebagai strategi pemerataan pembangunan nasional dengan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan luar Pulau Jawa (Bappenas, 2020).

Dalam dokumen perencanaan resmi, pembangunan IKN dirancang sebagai kota masa depan yang berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan, inklusivitas sosial, dan ekonomi hijau. Pemerintah menegaskan bahwa proyek ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di Kalimantan Timur (Pemerintah Republik Indonesia, 2022). Namun demikian, pengalaman pembangunan berskala besar di berbagai negara menunjukkan bahwa proyek pembangunan megastruktur sering kali menghadirkan konsekuensi sosial yang kompleks, terutama terkait dengan distribusi manfaat pembangunan.

Distribusi manfaat pembangunan menjadi isu krusial karena menentukan sejauh mana hasil pembangunan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan sosial dapat muncul ketika manfaat pembangunan lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu, seperti investor, elite politik, atau masyarakat pendatang yang memiliki modal dan keterampilan lebih besar. Sementara itu, masyarakat lokal kerap menghadapi keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan yang tercipta akibat pembangunan (Situmorang & Hidayat, 2021).

Dalam konteks Kalimantan Timur, pembangunan IKN membawa perubahan signifikan terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Alih fungsi lahan, pembangunan infrastruktur besar-besaran, serta meningkatnya arus migrasi penduduk berpotensi mengubah mata pencaharian masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat dan komunitas pedesaan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa kelompok masyarakat ini berada dalam posisi rentan terhadap marginalisasi sosial apabila tidak dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Yasmin & Rachman, 2022).

Dari sudut pandang politik pembangunan, ketimpangan sosial yang muncul tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan dan kebijakan negara. Negara memiliki peran dominan dalam menentukan arah pembangunan, skema investasi, serta regulasi penguasaan lahan dan sumber daya alam. Ketika kebijakan pembangunan lebih berpihak pada kepentingan pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal, maka risiko terjadinya ketimpangan struktural akan semakin besar (Rosser, 2020). Oleh karena itu, proyek IKN perlu dianalisis secara kritis sebagai arena politik pembangunan yang memperlihatkan tarik-menarik kepentingan antara negara, pasar, dan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana distribusi manfaat pembangunan dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) berkontribusi terhadap ketimpangan sosial di Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai sumber akademik, jurnal ilmiah, laporan kebijakan, serta dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan dalam lima

tahun terakhir. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai dinamika politik pembangunan IKN serta implikasinya terhadap keadilan sosial bagi masyarakat lokal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi literatur sistematis untuk menganalisis hubungan antara distribusi manfaat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan ketimpangan sosial di Kalimantan Timur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman dinamika sosial dan pola distribusi manfaat yang muncul akibat kebijakan pemindahan ibu kota, bukan pada pengukuran statistik semata. Studi literatur sistematis dianggap relevan mengingat keterbatasan akses langsung ke wilayah inti IKN, sementara berbagai publikasi ilmiah dan laporan resmi terkait dampak pembangunan IKN telah tersedia.

Data penelitian bersumber dari data sekunder berupa artikel jurnal terindeks nasional, prosiding ilmiah, buku akademik, laporan pemerintah, serta laporan lembaga swadaya masyarakat yang terbit pada periode 2020–2025. Penelusuran literatur dilakukan melalui portal jurnal nasional dengan kata kunci yang relevan dengan ketimpangan sosial, distribusi manfaat pembangunan, masyarakat adat, dan indikator ekonomi di Kalimantan Timur. Dokumen yang diperoleh kemudian dibedakan berdasarkan kesesuaian tema, konteks wilayah, dan kejelasan metodologi.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis konten tematik melalui proses pengodean dan pengelompokan tema, seperti distribusi manfaat ekonomi dan ketimpangan sosial. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai publikasi dan data statistik resmi.

3. PEMBAHASAN

a. Distribusi Manfaat Ekonomi

Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi Kalimantan Timur. Peningkatan investasi yang mencapai sekitar Rp 466 triliun menjadi pendorong utama tumbuhnya aktivitas ekonomi daerah, khususnya pada sektor konstruksi, properti, dan jasa pendukung. Pembangunan infrastruktur berskala besar turut meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur dan mendorong terbukanya sekitar 100.000 lapangan kerja baru. Dampak positif ini tercermin dari penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 21.630 jiwa, sehingga pada Maret 2025 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 199.710 orang atau sekitar 5,17 persen dari total penduduk.

Namun demikian, penurunan angka kemiskinan tersebut tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa nilai Gini Ratio Kalimantan Timur pada Maret 2025 mencapai 0,312, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum bersifat inklusif. Selain itu, kontribusi pengeluaran kelompok 40 persen masyarakat terbawah hanya sebesar 21,76 persen, yang menunjukkan bahwa sebagian besar manfaat pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi pada kelompok menengah dan atas.

Dari sisi ketenagakerjaan, pembangunan IKN memang membuka peluang kerja dalam jumlah besar, terutama pada fase awal pembangunan. Akan tetapi, distribusi kesempatan kerja menunjukkan ketimpangan yang cukup jelas. Sekitar 70 persen posisi kerja terampil dan strategis diisi oleh tenaga kerja migran, terutama dari Pulau Jawa. Sementara itu, masyarakat lokal cenderung terserap pada sektor informal atau pekerjaan kasar dengan tingkat upah rendah dan minim jaminan kerja. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan kesempatan (*inequality of opportunity*) yang membatasi kemampuan masyarakat lokal untuk memperoleh manfaat ekonomi jangka panjang dari pembangunan IKN.

Indikator	Data Maret 2025	Perubahan	Keterangan
Total Investasi IKN	Rp466 triliun	Meningkat	Didominasi sektor konstruksi
Lapangan Kerja	±100.000 orang	Bertambah	Mayoritas fase pembangunan
Penduduk Miskin	199.710 jiwa (5,17%)	Menurun	Turun 21.630 jiwa
Gini Ratio	0,312	Naik	Ketimpangan meningkat
Kontribusi 40% Terbawah	21,76%	Stagnan	Distribusi belum merata

Tabel ini menunjukkan bahwa meskipun pembangunan IKN mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja, indikator ketimpangan pendapatan justru mengalami peningkatan. Hal ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan masih bersifat eksklusif dan belum sepenuhnya berpihak pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

b. Ketimpangan Sosial dan Dampak terhadap Masyarakat Adat

Selain dampak ekonomi, pembangunan IKN juga menimbulkan persoalan sosial yang cukup kompleks, terutama bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa sedikitnya 51 komunitas adat di Kabupaten Penajam Paser Utara terdampak langsung oleh pembangunan IKN, termasuk komunitas Balik Sepaku dan Balik Peraluan. Proses akuisisi lahan seluas sekitar 6.000 hektare lahan ulayat dilakukan tanpa pengakuan formal terhadap Hak Guna Bumi Adat, sehingga memicu konflik agraria dan meningkatkan kerentanan sosial masyarakat adat.

Bagi masyarakat adat, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial, budaya, dan spiritual. Kehilangan akses terhadap lahan ulayat berdampak langsung pada hilangnya mata pencaharian serta mengancam keberlanjutan budaya dan identitas komunitas adat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial dan melemahkan kohesi sosial di tingkat lokal, terutama ketika masyarakat adat tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan.

Urbanisasi yang dipicu oleh pembangunan IKN turut memperparah ketimpangan sosial. Masuknya penduduk pendatang dalam jumlah besar meningkatkan persaingan dalam akses terhadap pekerjaan, lahan, dan layanan publik. Masyarakat lokal yang memiliki keterbatasan modal ekonomi dan Pendidikan cenderung kalah bersaing dengan pendatang. Akibatnya, terjadi peningkatan tekanan sosial, seperti naiknya harga tanah, meningkatnya biaya hidup, serta potensi konflik horizontal di tingkat komunitas. Pemerintah melalui Otorita IKN telah merancang berbagai program mitigasi sosial, salah satunya Program Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi (P3KE) yang ditujukan untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terdampak. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi program tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Aspek	Temuan	Implikasi
Komunitas adat terdampak	51 komunitas	Potensi konflik sosial
Luas lahan ulayat	±6.000 hektare	Hilangnya sumber penghidupan
Status hak tanah	Tidak diakui sebagai HGU Adat	Perlindungan hukum lemah
Urbanisasi	Meningkat	Persaingan sumber daya
Program mitigasi	P3KE	Implementasi belum optimal

Tabel ini menunjukkan berbagai bentuk dampak sosial yang ditimbulkan oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara terhadap masyarakat lokal dan masyarakat adat di Kalimantan Timur. Salah satu dampak paling menonjol adalah terjadinya penggusuran wilayah adat yang mengakibatkan hilangnya akses masyarakat terhadap lahan ulayat dan sumber penghidupan utama. Kondisi ini tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga mengancam keberlangsungan identitas sosial dan budaya masyarakat adat. Selain itu, meningkatnya arus urbanisasi ke kawasan sekitar IKN turut memicu persaingan dalam akses pekerjaan dan layanan publik, yang cenderung lebih menguntungkan pendatang dibandingkan masyarakat lokal. Dampak sosial lainnya terlihat pada munculnya konflik horizontal dan ketegangan sosial akibat perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembangunan IKN memerlukan pendekatan mitigasi sosial yang lebih partisipatif agar tidak memperdalam ketimpangan sosial yang sudah ada.

4. KESIMPULAN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan kebijakan strategis nasional yang membawa perubahan yang luar biasa dalam arah pembangunan Indonesia, khususnya dalam upaya mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan IKN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, pembangunan

infrastruktur, serta penciptaan lapangan kerja, yang tercermin dari menurunnya angka kemiskinan. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya bersifat menyeluruh. Peningkatan nilai Gini Ratio mengindikasikan bahwa distribusi manfaat pembangunan masih timpang, dengan kelompok masyarakat menengah dan atas memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan masyarakat lokal dan kelompok berpenghasilan rendah. Selain itu, pembangunan IKN juga menimbulkan persoalan sosial, terutama bagi masyarakat adat yang mengalami kehilangan akses terhadap lahan ulayat dan sumber penghidupan, serta meningkatnya tekanan sosial akibat urbanisasi dan persaingan sumber daya. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan IKN tidak seharusnya hanya diukur dari capaian ekonomi dan fisik semata, tetapi juga dari kemampuannya dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan afirmatif bagi masyarakat lokal melalui peningkatan akses pendidikan dan keterampilan, serta memastikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam setiap tahapan pembangunan. Selain itu, pelaksanaan program mitigasi sosial perlu dilakukan secara lebih efektif dan partisipatif agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak. Dengan pendekatan pembangunan yang lebih adil, dan berbasis partisipasi, IKN diharapkan tidak hanya menjadi simbol pemerataan pembangunan nasional, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Surabaya, atas dukungan akademik yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada berbagai pihak yang telah menyediakan data dan referensi, baik berupa dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, maupun publikasi ilmiah, yang sangat membantu dalam proses pengumpulan dan analisis data. Penulis mengapresiasi masukan dan kritik konstruktif dari dosen serta rekan sejawat yang turut berkontribusi dalam penyempurnaan artikel ini. Penulis berharap hasil kajian ini dapat memberikan manfaat akademik dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan pembangunan yang lebih adil, khususnya terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2025). Kemiskinan dan ketimpangan Kalimantan Timur Maret 2025. Badan Pusat Statistik.
- Bappenas. (2020). Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Hidayat, M. (2022). Penggusuran adat di Ibu Kota Negara. *Jurnal Hukum Adat*, 10(3), 78–95.
- Kaltimprov.go.id. (2025). Gini ratio Kalimantan Timur naik tipis 2025. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Nugroho, E. (2020). Metodologi studi kasus infrastruktur. *Jurnal Metodologi Sosial*, 8(1), 15–28. Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Jakarta.
- Pratiwi, R. (2024). Risiko ketimpangan sosial proyek Ibu Kota Negara. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 15(1), 112–130.
- Rosser, A. (2020). The politics of economic development in Indonesia: Contemporary challenges. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 321–340.
- Sari, N. P., & Santoso, A. (2023). Dampak relokasi Ibu Kota Negara terhadap pemerataan pembangunan regional. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(2), 45–60.
- Situmorang, A. W., & Hidayat, R. (2021). Pembangunan infrastruktur, investasi, dan ketimpangan sosial di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 201–218.
- Wijaya, A. (2021). Ketimpangan regional pasca Ibu Kota Negara. *Jurnal Ilmu Sosial*, 19(4), 200–215.
- Yasmin, N., & Rachman, N. F. (2022). Pembangunan, penguasaan lahan, dan ketimpangan sosial di Indonesia kontemporer. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(1), 1–15.